

# KLIPING BERITA

Sumber : Utara Post

13 Mei 2023

## Lagi-lagi BPK NTB Berikan KLU WTP, Ini yang Kesembilan Kali



Redaksi

13 Mei 2023 112 views



Penyerahan penghargaan WTP oleh Kepala Kantor Wilayah BPK Perwakilan Provinsi NTB, Ade Iwan Ruswana kepada Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu

MATARAM (NTB), Utarapost.net – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB tahun ini kembali memberikan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kali ini, WTP diberikan untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut, pada Jumat (12/5/2023).

Penghargaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPK Perwakilan Provinsi NTB, Ade Iwan Ruswana, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu bersama Ketua DPRD KLU, Artadi.

Kakanwil BPK Perwakilan Provinsi NTB, Ade Iwan Ruswana mengatakan bahwa BPK sudah memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada delapan kabupaten/kota di Provinsi NTB. Berdasarkan hasil audit BPK, semua daerah kabupaten/kota mendapatkan predikat opini WTP.

“Kami sudah melakukan review dan crosscheck terhadap hasil LKPD Pemerintah Daerah di NTB ini dan terbukti gercep memberikan laporan keuangannya,” ucapnya sumringah.

Menurut Ade Ruswana bahwa hasil audit dari keuangan dari Kabupaten Bima, KSB, KLU, Lotim, Dompu, Lobar, Kota Mataram dan Kota Bima menunjukkan hasil semua sudah cukup transparan dan akuntabel sehingga bisa memberikan data yang cukup banyak untuk laporan selanjutnya ke BPK Pusat.

“Saya berharap tidak ada temuan yang mempersulit pendataan bagi para auditor BPK, sehingga kerjasama BPK dan Pemda atau Pemkot di NTB bisa berjalan dengan sangat baik,” harap Ade.

Dalam pada itu, Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu diwawancarai terpisah menyampaikan bahwa WTP yang kesembilan merupakan apresiasi dari BPK NTB kepada Pemda KLU atas kinerja sungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan WTP.

“Terima kasih pada Kepala PD dan para Staf yang bekerja sungguh-sungguh dalam mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditentukan,” tuturnya.

Kegiatan juga dihadiri delapan Kepala Daerah di NTB, Ketua DPRD, Kepala BPKAD, serta para Inspektur Inspektorat Kabupaten/Kota. (dsr)